

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tradisional Indonesia, yang terorganisir dalam Nahdlatul Ulama (NU) sejak tahun 1926, merupakan fenomena yang unik di dunia Islam, dimana NU sendiri sesungguhnya merupakan suatu perhimpunan “ulama fiqh” (para ulama yang berpengetahuan luas dalam yurisprudensi Islam) dan “ulama tarekat” (sufi) (Elyasa KH. Dharwis, 1997:1).

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, menumbuhkan solidaritas dan integritas yang kuat, menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia selama bertahun-tahun. Gagasan yang pertama kali ketika NU dibentuk bukanlah dari wawasan politik, melainkan dari wawasan sosial keagamaan. Meskipun demikian wawasan tersebut tidak lantas menjadikan NU mengabaikan soal-soal politik.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang sangat memperhatikan masalah-masalah keagamaan, pembelaan yang gigih terhadap prinsip-prinsip Islam, meningkatnya kedekatan dengan kaum nasionalis dan kesediaan untuk berkompromi demi kesatuan nasional serta penilaian yang realistis terhadap kekuatan Islam, menandai pemikiran politik NU sepanjang periode sebelum tahun 1965.

Sejalan dengan tradisi politik Islam Sunni, NU dalam perjalanan sejarahnya di masa lalu biasanya bersikap akomodatif dan fleksibel terhadap pemerintah, dan para

pemimpinnya sering kali dituduh sebagai orang-orang yang oportunis. Namun selama tahun 1970-an, ketika kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan tersebut. Suara-suara protes terhadap berbagai ketetapan pemerintah yang tidak populer yang terdengar di DPR, ternyata berasal dari para utusan NU. (Pengkritik yang radikal, tentu saja tidak dapat ambil bagian dalam politik parlemen sejak tahap awal). Dua kali utusan NU melanggar prinsip politik konsensual yang sangat dijunjung tinggi dengan melakukan *walk out* dari DPR, tindakan tersebut tidak hanya merupakan protes terhadap undang-undang yang sedang disidangkan pada saat itu (salah satunya berkaitan dengan indoktrinasi ideologi resmi, Pancasila) tetapi juga menentang landasan pokok politik Orde Baru (Martin van Bruinessen, 1994:106).

Nahdlatul Ulama (NU) selalu menarik perhatian publik politik Indonesia. Pada saat politik sipil tidak diberikan arti yang sewajarnya, NU selalu mengingatkan bahwa bukan semua golongan sipil begitu. Pada saat politik sipil tidak berarti lagi, NU “mencuri” perhatian dan mengatakan “kami selalu hadir”. Pada saat semua partai politik disatukan, NU mengatakan bahwa “kami berbeda dengan yang ada” dan dengan itu menarik diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ditambah lagi dengan karakter mantan ketua umum PBNU, Abdurrahman Wahid, yang serba kontroversial, tidak terduga yang pada gilirannya mungkin menunjukkan karakteristik organisasi ini (Elyasa KH. Dharwis, 1997:125).

Menjelang Pemilihan Umum tahun 1955, ketika Wahid Hasyim masih hidup, NU memisahkan diri dari Masyumi lama, dan berkampanye sebagai suatu partai terpisah dan menempati posisi empat besar hasil Pemilihan Umum pertama. Kemudian pada tahun 1973 NU menyatukan dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun persatuan antara keduanya hanya seumur dua kali Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil keputusan Mukhtar Situbondo, pada tahun 1984 NU memutuskan untuk kembali ke *Khittah* 1926, yaitu: NU secara organisasi melepaskan keterkaitannya dengan partai tertentu (politik praktis) pada umumnya. Oleh karena itu NU keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan kembali menjadi NU tanpa embel-embel menjadi anggota partai politik, tetapi menjadi suatu lembaga pendidikan, sosial dan agama. Namun *Khittah* 1926 sama sekali tidak membatasi warga Nahdiyyin berkiprah dalam partai politik, ia hanya mengatur tentang tata cara dan langgam bagaimana bermain politik agar tidak berdampak kepada tindakan manipulasi agama demi kepentingan politik. Jadi menurut konsep tersebut NU tidak boleh berpolitik dan warga NU secara bebas menentukan kiprah dan pilihan politiknya.

Motto *Khittah* NU ketika itu berbunyi “*NU tidak memihak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana*”. Hal ini berarti bahwa para tokoh dan anggota NU bisa saja berkiprah di partai politik mana pun dan tidak perlu secara ketat atau fanatik berpihak pada partai politik tertentu. Menjelang pemilu 1987, NU mempertegas komitmen dan sikap politiknya dengan mengumandangkan motto baru “*tidak haram*

mencoblos Golkar, tidak dilarang memilih PPP, dan boleh memilih PDI’. Semua motto ini menyiratkan adanya kebebasan bagi warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke orsospol mana saja. Barangkali kebijakan ini bisa disebut sebagai suatu upaya “pendidikan politik” yang tentunya mengarah kepada “proses demokratisasi politik” yang secara kultural edukatif dilakukan oleh NU (Faisal Ismail, 2004:11).

Keputusan kembali kepada khittah pada hakikatnya merupakan keputusan politik, karena Khittah 1926 tetap memberikan kebebasan warganya untuk berpolitik, karena hasrat menyalurkan politik merupakan hasrat manusia yang wajar, khittah sama sekali tidak mengingkari manusia yang secara fitri dikodratkan sebagai makhluk berpolitik (zoon politicon). Hanya saja dalam konteks Orde Baru, perspektif khittah tidak menekankan penyaluran aspirasi politik melalui jalur formal.

Sejak itulah NU tidak lagi melibatkan dirinya di dalam kehidupan politik rutin meskipun ia tetap menjadi suatu organisasi dengan masa terbesar dari bangsa ini, sekaligus memutuskan untuk menerima ideologi Pancasila sebagai asas tunggal dalam anggaran dasarnya. Keputusan tersebut telah menambah perspektif baru bagi pemikiran gerakan organisasi ini. Hal ini telah menunjukkan bahwa respon NU terhadap situasi politik ketika itu memang berbeda dengan responnya terhadap situasi politik sebelumnya.

Organisasi ini juga semakin menarik perhatian masyarakat politik ketika jarak dengan Pemilihan Umum semakin dekat. Daya tariknya semakin besar justru karena kenetralannya di dalam politik Indonesia. Jumlah massa anggota yang besar laksana perawan yang menggelitik PPP dan Golongan Karya sekaligus.

Jatuhnya rezim Soeharto, yang diawali dengan krisis moneter (ekonomi) pada tahun 1997-1998, telah memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Tuntutan penataan kembali sistem politik, ekonomi dan hukum itulah dikenal sebagai tuntutan reformasi total atau menyeluruh. Namun demikian, perjuangan untuk tercapainya reformasi itu, tentu saja bukan suatu hal yang mudah, sebab keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat kita, lebih khusus pemimpin-pemimpin politiknya bisa mengantisipasi tuntutan-tuntutan itu (dalam Juri Ardiantoro F, 1999:17).

Seperti diketahui, lengsernya Soeharto dan munculnya parpol-parpol baru, telah menghasilkan tekanan luar biasa yang ditujukan ke PBNU untuk membentuk partai politik kembali. Hasil dari tekanan ini adalah lahirnya empat partai politik yang berafiliasi dengan NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Solideritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU). Empat partai ini tidak bertanding secara bersamaan, karena hanya satu yang direstui oleh PBNU, dan dikatakan “anak tunggalnya” NU, yaitu PKB.

Posisi istimewa PKB itu akhirnya menimbulkan perdebatan mengenai status khittah. Ada yang menyatakan bahwa karena PBNU hanya mengakui PKB, maka khittah itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada juga yang menanggapi bahwa adanya partai-partai yang berafiliasi dengan NU membuktikan bahwa khittah itu masih ada, dan warga NU bebas untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Sementara Yusuf Hasyim berpendapat lain bahwa seyogiayanya ada tuntutan supaya khittah itu

dibahas kembali (dalam Abuddin Nata, 2002:35).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dideklarasikan oleh para tokoh NU pada tanggal 23 Juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan, adalah partai politik yang mempunyai basis dukungan utama dari warga Nahdiyyin. Partai politik yang dibidangi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini merupakan partai Islam dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah, dan Ukhuwah Wathaniyah.

Lahirnya PKB yang dibentuk oleh para pembesar NU, secara tidak langsung hendak mengatakan “*wahai warga NU, pilihlah PKB sebagai wadah penyaluran aspirasi politik*”. Artinya massa NU secara formal sudah terkapling oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fenomena lain yang dapat kita lihat adalah sikap PBNU yang menjadikan PKB sebagai partai politik yang berasaskan Pancasila, bukan Islam. Hal ini menambah tanda tanya besar. PKB ditampilkan dalam sosoknya yang nasionalis, mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan melepas atribut agama, yang secara tersirat menolak Islam Politik dalam gerakan politik Indonesia, meskipun PKB sendiri, oleh sebagian besar kalangan telah dikategorikan sebagai salah satu partai politik Islam. Sebagai gerakan keagamaan, NU ternyata tidak memformalkan Islam dalam praktek politiknya.

Sikap NU tersebut sangat bertentangan dengan sikapnya pada tahun 1950-an, dimana relasi Agama-Negara pada sidang Konstituente 1957-1959 hendak diformalkan oleh semua partai Islam, NU termasuk di dalamnya. Islam pada saat itu

diperjuangkan oleh partai politik Islam sebagai dasar negara, walaupun NU pada akhirnya menerima jalan kompromi dengan Soekarno dan ABRI.

Sikap politik PBNU yang serba kontroversial ini, dan dalam situasi dimana partai-partai politik tumbuh menjamur menyemarakkan pesta demokrasi, tentunya peranan para elit politik dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat sangat dominan dan mereka akan menjalankan berbagai strategi politiknya secara maksimal guna memperoleh dukungan dari masyarakat luas, khususnya dari kalangan Islam.

Sikap elit-elit politik terhadap partisipasi politik di dalam setiap masyarakat, mungkin merupakan satu-satunya faktor yang paling menentukan yang mempengaruhi sifat partisipasi dalam masyarakat bersangkutan. Sementara itu rendahnya pendidikan politik di Indonesia yang mengakibatkan lemahnya pemahaman kalangan bawah (*grass root*) terhadap arti demokrasi dengan segala ambiguitasnya menciptakan suatu iklim politik yang memungkinkan terjadinya pembodohan massal oleh para politisi busuk terhadap rakyat. Sehingga manuver-manuver politisi kita terkesan dangkal dengan *money politic* dan politik kekuasaannya. Terlebih lagi ketika mereka (para elit) memanfaatkan unsur-unsur agama untuk menarik simpati massa. Padahal sejarah membuktikan bahwa partai-partai Islam sampai saat ini belum pernah menempati posisi puncak (menang) dalam setiap Pemilihan Umum. Al-Chaedar (1999:96), berpandangan bahwa semua sejarah partai-partai Islam tidak pernah mengemuka dalam kemenangan. Artinya, meski secara kuantitas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, namun aspirasi politiknya belum tentu bermuara ke satu partai Islam. Garis kelahiran mereka memang

mewariskan agama, akan tetapi tidak secara serta-merta mewariskan ideologi politik tertentu. Agama boleh Islam, namun ideologi belum tentu. Sehingga Cendekiawan Muslim Indonesia, Nurcholis Madjid pernah melontarkan jargon politik “*Islam Yes, Partai Politik Islam No*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap politik NU selama ini tidak konsisten, selalu berubah-ubah, bahkan terkadang sering menimbulkan kontroversi di kalangan NU sendiri. Maka, ditambah dengan masuknya elit-elit politik yang berusaha menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, dengan manuver politiknya akan mempengaruhi warga NU dalam menentukan pilihan politiknya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mencoba mengadakan penelitian tentang Pilihan Politik Ulama NU Pada Pemilu 2004 yang bertempat di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Karena walaupun mayoritas penduduk di Kecamatan Kresek menganut ajaran Ahlussunah wal Jama’ah yang diidentikan sebagai jama’ah Nahdlatul Ulama (NU), namun berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2004, menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakatnya beragam, tidak hanya tertuju pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan wadah penyalur aspirasi politik warga NU.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang penulis laksanakan, kaitannya dengan konsep dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam melahirkan kebijakan politiknya, jika dihubungkan dengan implementasinya dalam tataran realitas praksis, sesuai dengan fenomena yang selama ini terjadi pasca tumbangnya rezim Orde Baru, dimana NU dengan segala kebijakannya menyatakan bahwa secara mayoritas ulama NU memilih PKB sebagai salah satu wadah warga Nahdiyyin dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Namun apakah benar demikian? sementara dalam realitanya terdapat parpol-parpol lain yang sama-sama berbasiskan warga NU dan sekaligus dipimpin oleh kader-kader NU.

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penulis memformulasikan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Partai politik apa yang menjadi pilihan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada pemilu 2004?
2. Apa alasan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam memilih partai politik tertentu?
3. Bagaimana pendapat ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dengan banyaknya partai politik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini akan diarahkan pada terwujudnya suatu deskripsi yang akan memberikan kejelasan tentang fenomena yang terjadi di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, yaitu:

1. Untuk mengetahui partai politik pilihan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada pemilu 2004.
2. Untuk mengetahui alasan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam memilih partai politik tertentu.
3. Untuk mengetahui pendapat ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tentang banyaknya partai politik.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan pengetahuan di bidang politik Islam dan memperkaya wacana tentang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
- Secara praktis, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi civitas akademika, khususnya para praktisi politik Islam dalam mengembangkan strategi dan taktiknya demi tercapainya kemaslahatan umat.

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama Allah yang merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur pula dalam Islam adalah politik.

Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakikatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Disinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat dan tuntutan nilai-nilai Islam (dalam Sahar L Hasan, 1998:13).

Politik dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *siyasah*, berasal dari kata *sasa-yasusu-siyayah*. Secara harfiah, kata *as-siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dll (A. Djazuli, 2000:24).

Dalam pengertian *as-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *as-siyasah* dapat diartikan: *memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan*.

Jadi politik (*siyasah*), dalam pandangan Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, yang sesuai dengan syari’at atau nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut pemikir barat Harold D Lasswell, politik adalah soal “siapa mendapatkan apa, kapan

dan dengan cara bagaimana”. Dan Joyce Mitchell, mengartikan bawa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (dalam Umarudin Masdar dkk, 1999:4-5). Maka, peranan politik dalam kehidupan masyarakat sangat penting dan menentukan, karena kehidupan politik hanya dimiliki manusia, binatang dan makhluk lainnya tidak mengenal hal ini. Oleh karena itu sudah semestinya kalau manusia menerapkan dimensi-dimensi kehidupan politik terbaiknya. Pernyataan bahwa politik itu kotor adalah bukan pada substansinya.

Politik adalah suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kehidupan politik merupakan suatu keharusan, sebab manusia adalah makhluk sosial politik yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang lain. Tegasnya masyarakat harus mempunyai sistem politik yang dapat memenej segala urusannya.

Gerakan politik NU dalam tata politik di Indonesia selama ini, walaupun bentuk atau pendekatannya mungkin akan berubah, sesuai dengan iklim atau lingkungan politiknya, tujuan utamanya tetap sama. Hal ini sesuai dengan pandangan Greg Fealy, bahwa pada intinya doktrin politik NU terdiri dari tiga unsur kunci yaitu: 1). Amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن

المنكر وألئك هم المفلحون (آل عمران: ١٠٤)

Artinya:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.

Dan merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran:104).

Dari segi ini politik merupakan sarana untuk melaksanakan perintah Allah dalam menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sebagai konsekwensi logisnya, jalan yang ditempuh harus menggunakan jalan yang benar berdasarkan pada etika dan akhlak. Yang menurut Wahab Chasbullah dan Achmad Siddiq (dalam Greg Fealy, 2003:74), bahwa cara paling efektif untuk beramar ma'ruf nahi munkar adalah dengan memegang posisi yang berpengaruh dalam pemerintah. 2). Fleksibilitas, atau sikap menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berlaku (berdiplomatis). 3). Moderat, dalam arti tawassut, atau pendekatan jalan tengah.

Dengan doktrin politik yang bernuansa moderat dan fleksibel, dan dengan tujuan politik untuk menguntungkan warga Nahdiyyin, bisa dipahami bahwa perpolitikan NU selalu konsisten, walaupun cara atau metodenya berubah dari zaman ke zaman (dalam Abuddin Nata, 2002:37).

Strategi apapun yang digunakan dalam berpolitik, hal tersebut jangan sampai melanggar rambu-rambu atau aturan yang ada. Terlebih lagi bagi umat Islam yang sarat dengan norma dan etika yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang politik. Oleh sebab itu sejauhmana Islam dapat berperan sebagai sumberdaya politik akan sangat tergantung bagaimana para pelakunya, dan

juga kekuatan-kekuatan politik lain memanfaatkannya.

Dalam perkembangan politik di Indonesia pada pemilu 1999 terjadi polarisasi yang menimbulkan dua kutub penggolongan partai-partai peserta pemilu, yaitu partai politik yang berbasis agama dan partai nasionalis sekuler. Diantara partai-partai yang berbasis agama tersebut adalah partai-partai Islam.

Partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Miriam Budiardjo, 2000:160).

Dalam usaha mencapai cita-cita tersebut, para elit partai harus mampu meraih simpati rakyat guna memperkuat basis dukungan politik, dan untuk memperoleh dukungan rakyat, para elit harus menyampaikan seluk-beluk mengenai partainya secara terbuka kepada rakyat. Proses ini disebut sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah sebuah proses dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik secara umum adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy) (Miriam Budiardjo, 1998:1). Dan perilaku memilih yang dilakukan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten

Tangerang adalah salah satu bentuk partisipasi politik, yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum.

Keterlibatan masyarakat dalam dunia politik, adalah suatu perkembangan yang cukup bagus. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat sangat tinggi. Namun kesadaran politik warga negara baru bisa dikategorisasikan sebagai memadai jika kesadaran itu tumbuh dari pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep dasar politik. Nalar politik dengan demikian sangat terkait dengan pemahaman yang memadai tentang bekerjanya suatu teori politik, sekaligus memahami pengaruh-pengaruh langsung atau tidak langsung dari bekerjanya sistem tersebut terhadap diri dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, politik identik dengan kekuasaan, sedangkan kekuasaan tidak lepas dari negara sebagai integrasi dari kekuasaan politik, maka negara merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Eksistensi negara dalam hal ini, meniscayakan adanya perpaduan antara kebebasan subyektif, yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan kebebasan obyektif, yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar.

Mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, dikalangan umat Islam terdapat tiga aliran yang menanggapi hal tersebut:

Pertama, *Paham Integralistik*, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Islam bukan semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sebagaimana pengertian barat, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Aliran ini mencontohkan bahwa sistem

ketatanegaraan yang baik adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan Al-Khulafa Al-Rasyidin. Perspektif ini menghasilkan suatu pemahaman bahwa Islam adalah Agama dan Negara (al-Islam din wa al-daulah), maka kewajiban berpolitik juga merupakan kewajiban suatu agama. Agama menjadi alat formal untuk membentuk masyarakat baru. Paham ini dianut oleh kaum Sunni yang menekankan Ijma (pemufakatan) dan Bai'ah (pembaiatan) kepada kepala negara (Khalifah).

Paham Integralistik juga menjadi panutan kaum Fundamentalis Islam, yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma kaum Fundamentalis menekankan totalitas Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Menurut salah satu tokoh kelompok ini, yakni Al-Maududi, bahwa syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. Syariat adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan (tidak ada yang lebih ataupun kurang). Tokoh utama paham integralistik ini antara lain: M. Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan yang paling vokal adalah Abul A'la al-Maududi.

Kedua, *Paham Sekularistik*, yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yaitu hanya mengatur hal-hal yang bersifat vertikal dan tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul dan diutus dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Masalah

pemerintahan atau negara adalah masalah duniawi yang sepenuhnya diserahkan kepada manusia.

Salah seorang pemrakarsa aliran ini adalah Ali Abd Raziq, menurutnya bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafa al-Rasyidin. Islam juga tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki serta mempertimbangkan perkembangan sosial dan perkembangan zaman. Tokoh terkemuka paham Sekularistik ini antara lain: Ali Abd al-Raziq dan Dr.Thoha Husain.

Ketiga, *Paham Simbiosis*, paham ini tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat pertama dan kedua, tetapi aliran ini beranggapan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan atau sistem politik yang baku, tetapi dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Artinya Islam hanya memberikan prinsip-prinsipnya semata (gambaran secara umum), tidak secara terperinci. Aliran ini juga berpandangan bahwa antara agama dan negara terjadi “hubungan simbiosis”, dimana agama memerlukan negara, dan sebaliknya negara juga memerlukan adanya agama. Tokoh yang cukup menonjol dari paham Simbiosis adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Hussain Haikal (Ma'mun al-Brebesy, 1999:4-8).

Ketiga pemahaman di atas menurut Matori Abdul Djalil (1999:64), dalam artikulasi politik selanjutnya mengambil bentuk yang berbeda. *Pertama*, mereka yang

menghendaki adanya kaitan formal antara ideologi Islam dengan negara-politik; artikulasi politik selanjutnya sebagaimana fenomena yang terlihat sekarang ini adalah adanya partai-partai politik yang membawa simbol-simbol Islam (baik berasaskan Islam atau mendeklarasikan diri sebagai partai Islam). Dengan landasan ideologi dan pemahaman keagamaan serta kekuatan masa yang mayoritas Islam, maka optimisme kalangan yang menginginkan berdirinya partai politik yang berdasarkan agama mendapat peluang dan rasionalisasi.

Kedua, mereka yang tidak menghendaki adanya simbolisasi ataupun institusionalisasi agama, maka artikulasi politik selanjutnya lebih mementingkan pada konvergensi ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya partai-partai politik dari kalangan umat beragama yang bersifat inklusif dan terbuka, berasaskan kebangsaan dan tidak ideologis-primordialistik. Kelompok ini tidak menginginkan tampilan-tampilan simbolis atas agama, tetapi yang lebih signifikan adalah proses pribumisasi Islam sebagai ajaran dan tata nilai dalam kehidupan politiknya. Maka partai yang dideklarasikan lebih bersifat terbuka tersebut menggunakan simbol-simbol kebangsaan sebagai sebuah perjuangan politiknya.

Perbedaan pemahaman dan artikulasi politik dari kalangan Islam tersebut, disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai konsep negara Islam dan akar sejarahnya, serta adanya tuntutan politis dan sosio-kultural dalam kondisi sejarah tertentu. Perjalanan sejarah Islam menunjukkan bahwa tantangan yang berbeda telah menghasilkan respon ideologi yang berbeda pula. Dengan demikian, ekspresi ideologi umat Islam tidak akan sama jika mereka dihadapkan pada kondisi sosial-

politik yang berbeda. Sehingga pilihan politik umat Islam pun akan berbeda-beda.

E. Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan asumsi sebagai berikut:

1. Individu yang berpandangan integralistik, yang menghendaki kaitan formal antara Islam dan negara akan mendukung dan memilih partai politik Islam, sedangkan individu yang berpandangan sekularistik yang memisahkan relasi agama-negara akan mendukung dan memilih partai politik nasionalis-sekuler.
2. Individu yang merasa memiliki afinitas budaya NU akan lebih mudah memilih dan bergabung dengan partai politik yang secara *social origin* dari lingkungan NU.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yang menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan pandangan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam memilih partai politik. Selanjutnya, dari pemaparan-pemaparan dan data-data yang ada, ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan bertitik tolak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu mengenai partai politik yang menjadi pilihan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada pemilu 2004, alasannya dalam memilih partai politik tertentu dan pendapatnya mengenai banyaknya partai politik.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai terdiri dari dua kelompok yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, dengan cara mengadakan wawancara langsung dan studi kepustakaan sesuai permasalahan yang penulis teliti dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari dokumen-dokumen, koran dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan ulama NU di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yang dijadikan sampel penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Studi dokumentasi, yaitu terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat keterangan hasil wawancara yang diperoleh.

5. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah data terkumpul, dengan mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, hasil studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dilakukan klasifikasi data dan pemeriksaan ulang sampai pada penarikan kesimpulan.

6. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pralapangan; membuat rancangan penelitian, menentukan lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Pekerjaan lapangan; memahami latar penelitian, persiapan diri, memasuki lapangan, dan pengumpulan data.
- c. Menganalisa data yang telah terkumpul dan penulisan hasil penelitian.